



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 285 /SEK/OT.01.1/2/2021 2 Februari 2021  
Lampiran : 1 Berkas  
Hal : Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan  
Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021

Yth.

1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung;
2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan.

di -

Tempat

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2021 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka dihimbau kepada Para Pejabat Eselon I dan Para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding/Tingkat Pertama untuk melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi mandiri secara komprehensif dan mendalam terhadap komponen Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, yaitu **komponen pengungkit** dan **komponen hasil**. Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yaitu manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen sdm, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Komponen hasil yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
2. **Meningkatkan komitmen pimpinan dan komitmen bersama**, yaitu seluruh warga pengadilan harus terlibat aktif dalam pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM serta menularkan semangat dan visi yang sama sehingga terjadi perubahan secara sistematis dan konsisten terhadap mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*) serta budaya kerja (*culture set*).
3. **Membuat, mengembangkan dan menetapkan program/kebijakan/inovasi** yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat setempat (kearifan lokal) dan unit kerja.
4. **Memantau dan memonitoring efisiensi dan efektivitas penerapan program/kebijakan/inovasi** yang telah dibuat, dikembangkan dan ditetapkan, mengingat komitmen penerapannya akan menjadi salah satu unsur penilaian dalam evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
5. **Membentuk tim pengembangan inovasi unit kerja**, yang dapat menghasilkan ide inovasi baik yang berbasis teknologi informasi (aplikasi) ataupun tidak (kebijakan/kegiatan), yang berdasarkan kebutuhan unit kerja untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
6. **Membangun budaya *hospitality* dan orientasi terhadap pelayanan** dengan peningkatan kompetensi para petugas yang berhadapan langsung dengan masyarakat (seperti petugas PTSP dan petugas keamanan, melalui *coaching* dan *briefing* secara berkala.
7. **Menerapkan sistem *reward and punishment*** yaitu pemberian *reward* kepada Hakim dan Aparatur yang berprestasi/teladan secara berkala, dan pemberian sanksi bagi mereka yang melakukan tindakan indisipliner. Seluruh data terkait

penerapan *reward and punishment* pada unit kerja agar didokumentasikan dan menjadi bahan monitoring dan evaluasi.

8. **Melaksanakan manajemen media yang baik** melalui situs resmi pengadilan, media cetak, media elektronik, dan lain-lain secara berkelanjutan dengan menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat.
9. **Melakukan pemantauan, tindak lanjut, klarifikasi dan evaluasi** atas pengaduan ataupun ulasan negatif terhadap Aparatur dan/atau unit kerja yang bersumber dari media pengaduan/ulasan *offline* maupun *online* (Cth: kotak pengaduan, Siwas, *google review*, dll.) demi mempertahankan dan meningkatkan citra positif unit kerja.
10. Menghimbau **unit-unit kerja untuk melakukan *knowledge sharing*** dengan unit kerja percontohan yang telah bepredikat WBK/WBBM demi percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
11. **Unit kerja yang telah diusulkan namun belum berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM, serta unit kerja yang telah berhasil memperoleh predikat WBK pada tahun 2020**, secara otomatis akan diusulkan secara berjenjang untuk menjadi calon unit kerja bepredikat WBK/WBBM tahun 2021. Unit-unit kerja dimaksud agar menyampaikan kembali hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) tahun 2021 beserta data dukung yang termutakhirkan.
12. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding mengusulkan calon unit kerja bepredikat WBK/WBBM di wilayah hukumnya kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan masing-masing, berdasarkan hasil verifikasi pengajuan Pengadilan Tingkat Pertama oleh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tingkat Banding.
13. Direktur Jenderal Badan Peradilan menyampaikan daftar calon unit kerja bepredikat WBK/WBBM kepada Sekretaris Mahkamah Agung selaku Penanggung Jawab Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, untuk diusulkan mendapatkan evaluasi pembangunan Zona Integritas oleh Tim Penilai Internal (TPI).
14. Demi keselarasan langkah dan kebijakan guna memberikan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM diharapkan agar mengikuti rencana aksi sesuai lampiran pada surat ini.
15. Bagi Pengadilan Tingkat Banding yang membutuhkan **pendampingan/sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM** untuk unit kerja di wilayah hukumnya secara virtual/daring dapat membuat surat permintaan pendampingan yang ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung  
Republik Indonesia,  
  
Hasbi Hasan

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.

Lampiran Surat Sekretaris Mahkamah Agung

Nomor : 285/SEK/OT.01.1/2/2021

Tanggal : 2 Februari 2021

**TARGET PRIORITAS DAN OUTPUT YANG DIHARAPKAN  
DARI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM  
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN  
YANG BERADA DI BAWAHNYA**

NO	TARGET PRIORITAS	RENCANA AKSI	WAKTU	OUTPUT YANG DIHARAPKAN
1.	Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM (Bagi unit kerja yang belum mencanangkan)	Koordinasi dengan <i>stakeholder</i>	Januari s.d. Februari 2021	Penandatanganan Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
2.	Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Januari s.d. Februari 2021	SK Sekretaris Mahkamah Agung/Pimpinan Unit Eselon I/Ketua Pengadilan/Kepala Pengadilan tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
3.	Perencanaan program kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Januari s.d. Februari 2021	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM disertai Target dan Output serta <i>Roadmap</i> Pembangunan
4.	Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Sosialisasi, internalisasi dan publikasi Pembangunan Zona Integritas pada unit kerja	Januari s.d. Juni 2021	Pembuatan <i>banner</i> , poster, stiker, manajemen media dll
		Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara mandiri	Februari s.d. Juni 2021	Indeks Kepuasan Masyarakat
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada tahun berjalan	Januari s.d. Desember 2021	Laporan monitoring dan evaluasi implementasi dan hasil renja pembangunan Zona Integritas per triwulan
5.	Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya	Pengisian LKE dan penginputan data dukung	Februari 2021	LKE unit kerja
		Pengajuan unit kerja secara berjenjang, untuk menjadi calon unit kerja berpredikat WBK/WBBM	Minggu ketiga Februari 2021	Surat pengajuan Pimpinan unit kerja
		Pengusulan daftar calon unit kerja berpredikat WBK/WBBM oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan kepada Sekretaris Mahkamah Agung	Akhir Februari 2021	Surat Sekretaris Mahkamah Agung kepada Kepala Badan Pengawasan berupa daftar seluruh unit kerja untuk mendapat evaluasi pembangunan ZI oleh TPI

		Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM oleh TPI	Januari s.d. Mei 2021	Daftar unit kerja yang memenuhi syarat pengajuan predikat WBK/WBBM di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya tahun 2021
		Pengusulan calon unit kerja berpredikat WBK/WBBM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Paling Lambat <b>31 Mei 2021</b>	Diusulkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6.	Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM oleh Tim Penilai Nasional (TPN)	Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Pelayanan Publik ( <i>online/offline</i> )	Juni s.d. Oktober 2021	Oleh TPN melalui Badan Pusat Statistik atau pihak ketiga yang telah ditunjuk
		Pelaksanaan Desk Evaluasi	Juni s.d. Oktober 2021	Oleh TPN dalam hal ini Tim Evaluator Kementerian PANRB
		Kunjungan <i>mystery shopper</i> ke beberapa unit kerja yang dipilih oleh evaluator Kementerian PANRB	Juni s.d. November 2021	Oleh TPN dalam hal ini Tim Evaluator Kementerian PANRB
		Penilaian dan evaluasi <i>on the spot</i> (reviu lapangan)	Oktober s.d. Desember 2021	Oleh TPN dalam hal ini Tim Evaluator Kementerian PANRB
7.	Pengumuman unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM dan Pelopor Perubahan	-	Desember 2021	-